



UTUSAN KHUSUS  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## KEY NOTE SPEECH

TEMU NASIONAL PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN 2012  
WISMA MAKARA, KAMPUS UI DEPOK, 3-5  
DESEMBER 2012

# “Peran Strategis Perguruan Tinggi Untuk Penanggulangan Kemiskinan”

Excellencies, Profesores, para hadirin yang saya  
mulikan,

Selamat malam,

Saya bersyukur kehadiran Illahi Rabbi berada dalam majelis cendekia yang bernurani. Yang paling utama, saya menyambut hangat prakarsa sepuh yang tangguh dan utuh, Profesor Subroto, untuk mengajak sejawatnya memberikan sumbangsih nyata melawan kemiskinan. Apalagi, beliau dan para mitra tercinta bertekad menjadi *social glue* menyulut kembali kesetia-kawanan sosial. Tridharma akan didaya-gunakan seperti

senjata perkasa tri-sula, terutama matra-matra penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memusnahkan lawan. Ini merupakan sebuah kesadaran baru untuk kembali kepada fitrah, *back-to-basics*, mengaktualkan *mission-sacree* atau tugas suci lembaga pendidikan tinggi.

Sebelum menapak maju, perkenankanlah saya mengajak kita menoleh sebentar ke belakang untuk melihat peran perguruan tinggi (PT), dan secara lebih khas FEUI, dalam pembangunan selama ini. Preferensi menggunakan kaidah-kaidah Ekonomi Pasar yang mengagungkan pertumbuhan, tanpa memperhatikan kondisi tata-pemerintahan, atau *public-governance*, untuk mengisi kemerdekaan, sedari awal semakin meminggirkan mayoritas rakyat yang memang masih miskin hampir dalam seluruh matra. Menetapkan prioritas yang sangat baik tanpa memperhatikan *sequencing* membuahkan konglomerasi pada satu pihak dan guremisasi serta deforestasi pada pihak yang lain.

Bukan hanya kelembagaan ekstraktif penjajah yang menjelma kembali, Excellencies, tetapi ketiga pendorong pertumbuhan, yaitu **globalisasi**, **kemajuan teknologi**, dan **reformasi pro-pasar**, justeru memperlebar jurang kesenjangan. Akibatnya, 67 tahun setelah pernyataan kemerdekaan Bangsa, hampir separuh saudara kita masih dijajah kemiskinan. Transformasi struktural yang semu menciptakan TKI dan TKW yang digusur derita dari perdesaan, bukan petani mandiri yang naik-kelas menjadi cikal-bakal kelas menengah yang tangguh. Sumpah ber-Tanah-Air Satu seakan dinafikan oleh sentralisasi dan konsentrasi yang menghasilkan

disparitas demikian besar antara beberapa daerah seperti Nusa Tenggara dan Papua dengan Jakarta.

Kita kemudian berpaling ke desentralisasi dan otonomi daerah dengan maksud mendekatkan pelayanan ke masyarakat dan harapan akan lebih berpihak, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya – rakyat semakin jauh ditinggalkan. Kondisi masyarakat di sebagian besar daerah otonom yang baru, hampir tidak berubah sama sekali bahkan beberapa di antaranya semakin menurun. Anggaran belanja dibajak oleh elit dan birokrat untuk kepentingan mereka semata; kini banyak kabupaten/kota yang belanja aparatnya mencapai 70% dari APBD. Bila sudah demikian, apa lagi yang tersisa untuk rakyat?

Dalam pada itu, karena yang kita tanam adalah ekonomi pasar maka masyarakat pasarlah yang kita tuai. Sebuah masyarakat yang mereduksi segala hubungan antara sesama menjadi transaksi finansial semata. Seakan segala nilai kesolehan yang dikhotbahkan kyai dan pendeta maupun nilai kebajikan yang dikuliahkan profesor sudah hampa makna.

Kita juga mencemplungkan diri ke dalam pasar global tanpa menemu-kenali kemampuan kita maupun secara jeli memanfaatkan peluang untuk membentengi diri. Akibatnya kita kini seakan tidak berdaya menghadapi gempuran pemain global. Pasar domestik kita yang sangat besar menjadi ajang permainan berbagai negara, yang jauh maupun yang dekat. Tanah air yang subur dibanjiri produk asing mulai dari buah-buahan

yang seharusnya bisa kita produksi sendiri hingga barang-barang super-mewah.

Diperhadapkan pada seribu-satu persoalan yang tidak kelihatan ujung-pangkalnya masyarakat seakan pasrah. Namun tentu ada masalah yang jauh lebih mendasar manakala masyarakat diam seribu bahasa menyaksikan kasus korupsi puluhan miliar sementara saudara kita ada yang bunuh diri akibat kemiskinan. Menarik untuk disimak bahwa semua politisi, pejabat, hakim, jaksa, dan perwira polisi, merupakan lulusan PT. Kita perlu mengintrospeksi mengapa proses pengajaran dan pembelajaran menghasilkan manusia yang “memangsa” rakyatnya sendiri, *homo homini lupus*, serta menghasilkan kelas menengah yang tidak sadar dan tidak berdisiplin. Jelaslah bahwa kemiskinan yang mengitari kita bukan merupakan sekedar persoalan yang dapat dijawab secara teknokratis. Ini merupakan krisis kemanusiaan yang menuntut solusi berlandaskan budaya Bangsa. Dari mana kita mulai?

Tentu dari diri sendiri, Excellencies. Paling pertama, kita harus sungguh-sungguh membangun masyarakat akademik yang sepaham tentang nilai-nilai mencari kebenaran melalui metoda yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Yang mampu melintasi segala sentimen primordial untuk mengarahkan ilmu-pengetahuan dan teknologi kepada upaya membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Menggalang manusia yang bernurani merupakan *sine qua non* agar PT dapat berperan sebagai pusat kebudayaan Bangsa. Kepada pelamar menjadi dosen sebaiknya diperingatkan

bahwa apabila ingin kaya, jadilah pengusaha, ingin berkuasa, jadilah politisi, tetapi kalau terpanggil menempe generasi, tempatnya memang disini!

Pada awal tahun tujuh puluhan PT menjadi penggerak awal dan utama upaya kita mulai membangun bangsa berlandaskan sektor pertanian yang tangguh. Bukan hanya mencapai swasembada beras pada 1984, kita juga mencatatkan penurunan kemiskinan terbesar sepanjang sejarah modern. Ke depan kita harapkan PT kembali dapat memainkan peran strategisnya untuk mendorong reorientasi pembangunan agar benar-benar berpihak kepada warga bangsa yang terlemah dan paling tertinggal yaitu petani dan warga miskin perkotaan. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang kita bangun adalah Bangsa, bukan perseroan. Oleh karena itu kita harus mulai dari komponen bangsa yang terlemah mengingat bahwa *“you are as strong as the weakest of your people”*. Kita harus menerapkan apa yang saya sebut *growth-through-equity*, agar pertumbuhan yang kita kejar tidak hanya dinikmati oleh segelintir oknum tetapi membawa kemaslahatan bagi setiap warga bangsa, betapapun tidak berdayanya dia.

Dalam suasana *distrust*, saling tidak-percaya, yang kini sedang mencekam kehidupan ber-Bangsa, penting sekali PT membangun kembali kemandiriannya, tidak turut larut dalam kepentingan politik atau sektarian, maupun kepentingan sesaat lainnya. Kesadaran baru mulai diwujudkan melalui pergantian paradigma bersaing memenangkan kompetisi menjadi paradigma *“Fellow Travellers on the Spaceship Earth”*, bahwa kita

sebiduk, dengan kesejahteraan yang saling bertaut. Bahwa Alam Raya tidak mengenal *externalities*. Bahwa yang dimaksudkan dengan manusia itu khalifah, bukanlah sebagai Master, tetapi lebih sebagai *Steward*, pengayom. Paradigma ini harus dapat mulai dijabarkan dalam seluruh proses maupun substansi pengajaran dan pembelajaran. Pengejaran laba tidak perlu diharamkan apalagi kalau itu menginspirasi inovasi selaras kesadaran baru. Dengan perkataan lain, setiap investasi itu sebaiknya menghasilkan *social benefits*, manfaat bagi masyarakat, yang lebih besar dibanding *private gains*, laba bagi perorangan.

Keberpihakan kepada yang dimarginalkan, baik pribadi, kelompok, maupun daerah, perlu menjiwai setiap langkah yang diambil secara konsisten. Yang segera dapat dilakukan adalah memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang kurang beruntung, melalui, a.l. program matrikulasi, *mentoring*, maupun mengupayakan tambahan dana biaya-hidup dari misalnya Ikatan Alumni. Diharapkan, perlakuan khusus ini akan mampu mengkompensasi ketertinggalannya dibandingkan mahasiswa yang sudah lebih mapan sedari awal.

Kedua, perkuat PT di daerah yang marginal melalui, misalnya, program *twinning*, baik pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi. Pengutusan dosen-terbang ke universitas di daerah telah pernah dilaksanakan dengan baik sekali oleh FEUI. Dengan demikian mereka pun dapat berperan-serta aktif dalam jejaring antar-universitas, menjadi sebuah *moral*

*force* yang mampu menuntut pertanggung-jawab baik eksekutif maupun legislatif atas penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dari mulai Pusat hingga ke Daerah. Ketiga, melaksanakan K2N tematik, sehingga setiap angkatan melanjutkan/meningkatkan karya angkatan sebelumnya di lokasi yang sama, menjalin diskursus-setara guna membantu meningkatkan kemandirian rakyat.

Keberpihakan itu diupayakan merasuk ke dalam seluruh matra kehidupan kampus, sehingga setiap khotbah misalnya, mengutip firman maupun *hadist* yang menganjurkan berbagi. Para dosen muda dapat menjadi tauladan mengajak mahasiswa bersama mengulurkan tangan kepada anak-anak jalanan. Sumbangan tidak selalu harus berupa uang, waktu dan belaian tidak kurang pentingnya.

Excullencies, saya yakin, dengan Profesor sebagai jangkar-nilai, dosen muda sebagai penggagas terobosan, dan mahasiswa sebagai ujung tombak, PT dapat menjadi *solidarity-maker* yang menghimpun seluruh komponen Bangsa untuk mengakhiri penjajahan kemiskinan.

***MERDEKA!***